

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aminah, S dan Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana.
- Amunulloh, Naeni. (2015). *Demokrasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Dawiyanto, Agus. (2022). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Galang Printika.
- Hamdi, Muchlis. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori Konsep, dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers.
- Kauffman, D, Kraay, A And Massimo Mastruzzi. (2012). *The Worldwide Governance Indicators. Methodology And Development At Brookings*.
- Mardiasmo. (2009). *Akutansi Sektor Publik (IV)*. ANDI OFFSET.
- Palupi Sri. (2016). *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undnag Desa Berbasis HAK*. Jakarta Selatan: Lakpesdam PBNU.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: PT Mandar Maju.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

PERATURAN MENTERI

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa*.

PERATURAN PEMERINTAH

Republik Indonesia . (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendoatan dan Belanja Negara.*

Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.*

JURNAL

Ali, F. (2022). *Administrative Ethics and Professional Competence: Accountability and Performance under Globalization.* International Review Of Administrative Sciences, Vol. 68, PP 127.

Arif Rivian dan Irfan Ridwan Maksum. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 92-101.

Herdiana, D. (2019). *Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa.* Matra Pembaruan, 3 (1), 1-11.

Kemenkeu RI. (n.d.). *Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan (Manajemen Pemerintahan Daerah).*
<https://klcfiles.kemenkeu.go.id/2018/04/manajemen-keuangan-pemerintah.pdf> (diakses 03-1-2-22).

Kurtz, M. J.dan Schrank, A. (2007). *Growth and Governance: Models, Measures, and Mechanisms.* The Journal Of Politics, Vol. 69, No.2, 538-554.

Nofianti, Leny dan Novie Susanti Suseno. (2014). *Factors affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and Their Implications towards Performance Accountability.* Procedia-Social And Behavioral Sciences, Vol. 164, , 98-105.

Santoso, Urip dan Yohannes Joni Pambelum. (2008). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kerja Instansi*

Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. Administrasi Bisnis, Vol. 4 (1), 14-33.

Sugiman. (2016). *Pemerintah Desa. Binamulia Hukum Vol 7 (1), 82-95.*

Sukmawati, F. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut) . *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM, 52-67.*

Titiek Puji Astuti dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1-14.*

Yunus Rohim N. (2016). *Menciptakan Good And Clean Government Berbasis syariah islamiyah dalam tata kelola pemerintahan republik indonesia.* Nur El-Islam Vol. 3 (1), 143-175.

REFERENSI SKRIPSI

Taufik, T. (n.d.). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.*

INTERNET

<https://www.kemendagri.go.id/2016> (diakses 30 Desember 2021)

<http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-goodgovernance> (diakses 25 Desember 2021)

<https://www.cnnindonesia.com/tag/indonesia-corruption-watch/amp> (diakses 03 Januari 2022)